



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DISPRIANSYAH**
2. Jabatan : **EXECUTIVE VICE PRESIDENT OPERASI SISTEM KETENAGALISTRIKAN**
3. NHK : **408546**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.864.032.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1256 m2/158 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.455.200.000
2. Tanah Seluas 17510 m2 di KAB / KOTA WAY KANAN, HASIL SENDIRI Rp. 140.080.000
3. Tanah Seluas 18594 m2 di KAB / KOTA WAY KANAN, HASIL SENDIRI Rp. 148.752.000
4. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.025.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
2. MOBIL, HONDA CIVIC / SEDAN Tahun 2019, LAINNYA Rp. 355.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L Tahun 2020, LAINNYA Rp. 445.000.000
4. MOTOR, GESIT G1 / MOTOR LISTRIK Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 139.022.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 170.152.054

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.198.206.054



III. HUTANG

Rp. 418.244.393

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.779.961.661

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.